Tidiq Delwandi

Pembangkangan sipil (*civil disobedience*): Makhluk apa itu?
Oleh : Sonny S. Saragih

Seperti tema yang telah ditentukan, saya diminta berbicara tentang pembangkangan sosial (*civil disobedience*). Sebelum kita membahas *civil disobedience* lebih lanjut, menurut hemat saya kita perlu mengetahui terlebih dahulu posisinya dalam kajian Ilmu Politik.

Ketika kita berbicara tentang *civil disobedience* sebagai kajian politik, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari suatu keadaan konflik antarkelompok yang memperebutkan hal yang sama (Ramlan 1992). Biasanya konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintahnya, dimana masing-masing berupaya keras mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama dan akan selalu menuju ke arah kesepekatan (konsensus). Dalam pendekatan konflik, masyarakat tak mungkin terintegrasikan secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok dominan. Sebaliknya masyarakat yang teritegrasi atas dasar konsensus sekalipun juga tidak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan.

Konflik politik secara longgar dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Sedangkan secara sempit, konflik politik sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur dan prosedur yang menganut hubungan-hubungan di antara partisipan politik.

Namun yang perlu dipahami adalah, konflik dalam kajian politik tidak perlu selalu dipahami sebagai kekerasan yang mengandung pengertian "benturan" seperti huru hara, kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan dan separatisme, serta revolusi. Karena kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dan yang perlu diingat adalah bahwa konflik yang mengandung kekerasan terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

Konflik juga ada yang tak berwujud kekerasan. Konflik seperti ini pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Unjuk rasa (demonstrasi), pemogokan , petisi dan protes, dialog, polemik di surat kabar dan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) termasuk dalam konflik tanpa kekerasan yang dimaksud di sini.

Pembangkangan sipil (*civil disobedience*) dalam konteks politik pada hakekatnya merupakan bentuk perlawanan sosial. Namun sebagai perlawanan sosial tanpa kekerasan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan perlawanan politik yang menggunakan cara kekerasan seperti huru-hara, kudeta, pembunuhan atau terorisme, pemberontakan, separatisme serta revolusi, yakni menghendaki perubahan. Namun secara metode, cara yang dipakai antara keduanya sangat berbeda. Pembangkangan sipil (*civil disobedience*) cenderung ingin mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menghindari kekerasan bahkan cenderung pasif (pasif action) dalam merespon kebijakan politik pemerintah yang tidak disetujuinya.

Dari sisi subyek pelaku, pembangkangan sipil (*civil disobedience*) umumnya dilakukan oleh *pertama,* kelompok buruh berunjuk rasa dan mogok untuk memperjuangkan hak-hak mereka

di kota besar. *Kedua,* kelompok mengambang di pedesaan yang melakukan perlawanan misalnya enggan memberikan suara dalam pemilihan kepala desa (golput). *Ketiga,* kelompok marginal perkotaan dan kelompok tani pedesaan. Serta *keempat*, mahasiswa dan kelompok kelas menengah lain seperti LSM, ulama dan agamawan.

Secara historis, pada dekade akhir sebelum Reformasi, bentuk pembangkangan sipil (*civil disobedience*) termanifestasi dalam simbol "arus bawah" (Nurhasyim: 1998). Arus bawah secara harafiah mengindikasikan "gerakan rakyat" yang mendekati, menentang atau melawan arus atas (gerakan *state*). Pada tataran kedua kutub itu, logika konflik menjadi kekuatan dinamis yang menandai pola baru yakni *state vis a vi society*. Gerakan "arus bawah" itu diantaranya, Kasus BPPC, kasus jenggawah, Waduk Kedungombo, Nipah, dll. Dalam melakukan protes sosial, gerakan-gerakan ini kita lihat tidak menggunakan kekerasan. Tetapi sebaliknya mereka cenderung menjadi obyek kekerasan dari negara. Dengan melakukan perlawanan, mereka menganggap akan lebih efektif dengan pembangkangan sosial dibandingkan jika melakukan perlawanan dengan kekerasan, apalagi pada saat itu negara masih dalam kondisi 'sangat kuat".

Dari sederetan protes sosial dengan beragam dinamikanya tersebut, para pakar politik dan sosial memari benang merah dengan dugaan bahwa protes-protes sosial yang berkembang merupakan akibat dari kesenjangan ekonomi, hukum dan sosial yang banyak dialami serta dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

Untuk menghindari kerancuan istilah arus bawah harus dibedakan dengan "people power" seperti yang terjadi di Filiphina dan reformasi 1998. Realitas politik arus bawah tidak sampai kearah pengambilalihan kekuasaan. Arus bawah hanya mengindikasikan munculnya keinginan masyarakat dalam soal kontrol politik dan kekuasaan. Arus bawah mengindikasikan adanya tuntutan-tuntutan dalam tiga skala perubahan politik, yaitu perubahan secara radikal, perubahan dari dalam sistem politik dan perubahan kebijaksanaan pemerintah. Akar perbedaan antara pemikiran arus bawah dan arus atas dapat dilihat sebagai berikut:

Arus bawah:

a) Identitas dan basis sosial : kaum pinggiran, kaum tertindas-basis sosial rentan dan lemah.
b) Idelogi dan gaya politik : radikal dan perlawanan
c) Perubahan sosial : perubahan dari bawah melalui melalui perjuangan politik
d) Arah perubahan sosial : peruahan secara radikal atau mengganti nilai-nilai dan struktur politik.
e) Cita-cita politik : adanya kontrol politik dari masyarakat terhadap negara agar kekuasaan negara tidak tak terbatas.

Arus atas:

a) Identitas dan basis sosial : Elit penguasa, birokrasi, militer, basis sosial mapan.
b) Ideologi dan gaya politik : stabilitas politik dan keseimbangan
c) Perubahan sosial : perubahan struktural melalui kebijakan politik tambal sulam
d) Arah perubahan sosial : perubahan secara damai dan bertahan
e) Cita-cita politik : stabilitas politik dan pembangunan nasional berkelanjutan.

Pada intinya dari semua fenomena pembangkangan sipil (*civil disobedience*) yang ada di Indonesia, mempunyai pola yang sama, dimana terjadi perbedaan kepentingan dalam memperebutkan hal yang sama namun tidak dengan cara kekerasan.